

Implementasi Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 Dalam Program (RTLH) Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Studi Pada Kecamatan Kuripan Probolinggo

Siti Marwiyah ⁽¹⁾, Andhi Nur Rahmadi ⁽²⁾, M. Fathur Rizki ⁽³⁾

¹²³Ilmu Administrasi Publik, Universitas Panca Marga, Kota Probolinggo
e-mail: marwiyah@upm.ac.id, andhi.iansyah@gmail.com, elrizqy99@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of Probolinggo Regent Regulation No. 07 of 2020 related to the rehabilitation program for uninhabitable houses (RTLH) in Kuripan District. The background of this research arises from the urgency to improve housing conditions that are suitable for the community, considering that many houses still do not meet health and safety standards. The method applied in this research is a qualitative approach, involving 15 informants consisting of government officials, beneficiaries, and local community leaders. The data analysis technique used is thematic analysis, which allows the researcher to identify and categorize the main themes from the data obtained through interviews and observations. The research findings indicate that the success of the RTLH rehabilitation program is influenced by several factors, including community participation, availability of resources, and the existing bureaucratic structure. Although there have been some achievements in the RTLH rehabilitation, challenges related to inter-agency coordination and budget limitations remain significant obstacles. The conclusion of this study recommends that local governments enhance communication and collaboration among agencies, as well as encourage more active community participation at every stage of the program. Additionally, the importance of periodic evaluations to adjust the program to the evolving needs of the community is also emphasized.

Keywords: *Implementation, Regent Regulation, rehabilitation, uninhabitable houses, community participation.*

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Kuripan. Latar belakang penelitian ini muncul dari urgensi untuk memperbaiki kondisi perumahan yang layak bagi masyarakat, mengingat masih banyak rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan melibatkan 15 informan yang terdiri dari pejabat pemerintah, penerima manfaat, dan tokoh masyarakat setempat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan tema-tema utama dari data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan program rehabilitasi RTLH dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk partisipasi masyarakat, ketersediaan sumber daya, dan struktur birokrasi yang ada. Meskipun ada beberapa pencapaian dalam rehabilitasi RTLH, tantangan terkait koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan yang signifikan. Kesimpulan dari penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah

meningkatkan komunikasi dan kerjasama antarinstansi, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif dalam setiap tahap program. Selain itu, pentingnya evaluasi berkala untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang juga ditekankan.

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Bupati, rehabilitasi, rumah tidak layak huni, partisipasi masyarakat.

1. Pendahuluan

Rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu masalah penting yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Probolinggo. Menurut informasi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Probolinggo pada tahun 2020, sekitar 15% dari keseluruhan rumah yang ada di daerah tersebut tergolong dalam kategori tidak layak huni. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan para penghuninya (BPS Probolinggo, 2020).

Masalah RTLH tidak hanya mempengaruhi kondisi fisik bangunan, tetapi juga memiliki dampak yang luas pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Keluarga yang tinggal di RTLH sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya dapat memperburuk kualitas hidup mereka. Hal ini dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti penyakit pernapasan, infeksi, dan gangguan kesehatan lainnya. Selain itu, tinggal di RTLH juga dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial dan ekonomi penghuninya, karena mereka mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan dan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. (Kementerian PUPR, 2021).

Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kabupaten Probolinggo telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 07 Tahun 2020. Peraturan ini dirancang untuk melakukan rehabilitasi terhadap rumah

tidak layak huni (RTLH) melalui pelaksanaan program yang terstruktur dan terencana dengan baik. Dengan adanya program ini, diharapkan dapat tercapai peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penurunan jumlah RTLH di daerah tersebut.

Program rehabilitasi ini tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan layak huni bagi masyarakat. Melalui pendekatan yang sistematis, diharapkan semua aspek yang berkaitan dengan RTLH dapat ditangani secara menyeluruh, termasuk peningkatan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pendidikan. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Bupati ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat, serta membantu mengurangi angka RTLH yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Berbagai studi sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh Sari (2019) dan Rahman (2020), mengindikasikan bahwa keberhasilan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat serta pelaksanaan evaluasi secara rutin. Meskipun demikian, masih ada kekurangan dalam penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kuripan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi RTLH, masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Fokus pada

Kecamatan Kuripan menjadi penting, mengingat karakteristik dan tantangan unik yang mungkin dihadapi oleh daerah tersebut dalam menerapkan kebijakan ini. Dengan demikian, penelitian lebih lanjut di area ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai bagaimana implementasi Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 dalam program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kuripan

Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan kerangka teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III sebagai dasar analisis. Fokus dari analisis ini adalah pada elemen-elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu: (a) Komunikasi, yang mencakup cara informasi disampaikan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat; (b)

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami bagaimana Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 diimplementasikan dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Kuripan. Dalam penelitian ini, terdapat 15 informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu individu yang memiliki keterlibatan langsung dalam program rehabilitasi RTLH, termasuk pejabat pemerintah daerah, warga yang menerima bantuan, serta tokoh masyarakat setempat. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana individu dipilih secara sengaja berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka yang relevan dengan topik yang diteliti (Palinkas *et al.*, 2015)

Untuk mengumpulkan data, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara semi-terstruktur, yang dirancang untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pengalaman dan pandangan informan terkait implementasi

Sumber Daya, yang meliputi ketersediaan anggaran, tenaga kerja, dan material yang diperlukan untuk pelaksanaan program; (c) Disposisi, yang berkaitan dengan sikap dan komitmen para pelaksana program; dan (d) Struktur Birokrasi, yang mencakup bagaimana organisasi dan prosedur dalam birokrasi dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan program.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Probolinggo.

kebijakan tersebut (Etikan *et al.*, 2016). Selain itu, observasi lapangan juga dilakukan untuk memperoleh data kontekstual yang lebih kaya mengenai kondisi RTLH di Kecamatan Kuripan. Dalam rangka memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen terkait, sehingga dapat meningkatkan validitas hasil temuan (Flick, 2018).

Prosedur analisis data dilakukan secara sistematis. Pertama, data yang diperoleh dari wawancara dan observasi akan direkam, ditranskrip, dan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik (Denzin, 2017). Dalam proses analisis ini, peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, mengelompokkan informasi berdasarkan kategori yang relevan, dan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan (Creswell & Poth, 2017).

Hasil dari analisis ini akan disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan dinamika implementasi kebijakan di tingkat lokal, serta tantangan dan peluang yang

dihadapi dalam program rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kuripan. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan publik di daerah tersebut (Braun & Clarke, 2016).

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 dalam program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Kuripan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, meskipun terdapat beberapa keberhasilan yang signifikan. Dari analisis data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumen, terungkap bahwa partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Dalam penelitian ini, teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Fokus analisis ini terletak pada beberapa elemen penting yang berkontribusi terhadap keberhasilan program. Pertama, Komunikasi menjadi aspek yang sangat krusial, karena mencakup cara informasi disampaikan dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam program, termasuk pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Keterbukaan dan kejelasan dalam komunikasi dapat mempengaruhi pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Kedua, Sumber Daya merupakan faktor yang tidak kalah penting, yang mencakup ketersediaan anggaran, tenaga kerja, dan material yang diperlukan untuk melaksanakan program secara efektif. Tanpa sumber daya yang memadai, pelaksanaan program dapat terhambat, sehingga mengurangi dampak positif yang diharapkan. Ketiga, Disposisi berkaitan

dengan sikap dan komitmen dari para pelaksana program, yang sangat mempengaruhi seberapa baik program tersebut dapat dijalankan. Sikap positif dan komitmen yang tinggi dari pelaksana dapat mendorong keberhasilan program, sementara sikap negatif dapat menjadi penghalang.

Terakhir, Struktur Birokrasi memainkan peran yang signifikan, yang mencakup bagaimana organisasi dan prosedur dalam birokrasi dapat mendukung atau bahkan menghambat pelaksanaan program. Struktur yang jelas dan efisien dapat mempercepat proses implementasi, sedangkan birokrasi yang rumit dapat menyebabkan keterlambatan dan kebingungan. Dengan menganalisis elemen-elemen ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan rehabilitasi RTLH di Kecamatan Kuripan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Proses triangulasi data yang dilakukan mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah berusaha untuk melibatkan masyarakat dalam program ini, masih ada beberapa hambatan yang terkait dengan komunikasi dan koordinasi antara berbagai instansi. Hambatan-hambatan ini menghalangi pelaksanaan program agar dapat berjalan dengan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun niat baik untuk melibatkan masyarakat ada, tantangan dalam hal interaksi dan kerjasama antar lembaga masih perlu diatasi agar program dapat diimplementasikan secara maksimal. (Kementerian PUPR, 2021).

Berdasarkan hasil observasi, beberapa rumah yang telah menjalani proses rehabilitasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kondisi fisiknya, sementara rumah lainnya masih berada dalam keadaan yang memprihatinkan. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa keterbatasan dalam alokasi anggaran dan

kurangnya sumber daya manusia yang memadai menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2020), yang menekankan bahwa keberhasilan program rehabilitasi sangat bergantung pada adanya dukungan sumber daya yang cukup. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya investasi yang memadai dalam hal anggaran dan tenaga kerja, upaya untuk memperbaiki kondisi perumahan bagi masyarakat akan mengalami kesulitan dan tidak mencapai hasil yang diharapkan.

Meskipun demikian, beberapa inisiatif lokal yang melibatkan masyarakat dalam proses rehabilitasi menunjukkan hasil yang positif, yang mendukung penelitian oleh Sari (2019) yang menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mencapai tujuan program.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi RTLH, perlu ada peningkatan dalam hal

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan temuan dari penelitian tentang pelaksanaan Peraturan Bupati Probolinggo No. 07 Tahun 2020 terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kecamatan Kuripan, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan program ini dipengaruhi oleh beberapa faktor penting. Faktor-faktor tersebut meliputi keterlibatan masyarakat, ketersediaan sumber daya, sikap dan komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang ada. Meskipun ada beberapa pencapaian dalam rehabilitasi RTLH, seperti perbaikan kondisi fisik rumah, masih terdapat tantangan yang signifikan, terutama dalam hal koordinasi antarinstansi dan keterbatasan anggaran yang menghambat pelaksanaan program secara optimal.

komunikasi dan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah serta peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya evaluasi berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah (Creswell & Poth, 2017).

Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga menyajikan saran-saran yang bermanfaat untuk meningkatkan program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Probolinggo. Rekomendasi ini diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kecamatan Kuripan. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai panduan bagi pengambil keputusan dan pemangku kepentingan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan rehabilitasi perumahan yang lebih baik.

Keterbatasan dalam penelitian ini mencakup jumlah informan yang relatif sedikit dan fokus yang hanya pada satu kecamatan, sehingga hasil yang diperoleh mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan situasi di seluruh Kabupaten Probolinggo.

Untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi RTLH, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat komunikasi dan kerjasama antara berbagai instansi serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih aktif di setiap tahap program. Rekomendasi lain yang dapat dipertimbangkan adalah perlunya evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Selanjutnya, arah penelitian di masa depan dapat diarahkan pada studi komparatif di antara kecamatan yang berbeda untuk memahami faktor-faktor

yang mempengaruhi keberhasilan program rehabilitasi RTLH dalam konteks yang beragam, serta untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang dari program ini terhadap kualitas hidup masyarakat.

Dengan demikian, penelitian yang lebih mendalam diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai implementasi kebijakan publik di sektor perumahan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arnstein, S. R. (1969). "A Ladder of Citizen Participation." *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Probolinggo. (2020). *Statistik Daerah Probolinggo 2020*. Probolinggo: BPS Probolinggo.
- Braun, V., & Clarke, V. (2016). *Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge.
- Edward III, G. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). *Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
- Flick, U. (2018). *An Introduction to Qualitative Research*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kementerian PUPR. (2021). *Laporan Tahunan Program Rehabilitasi RTLH*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). *Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533-544.
- Rahman, A. (2020). "Evaluasi Program Rehabilitasi RTLH: Studi Kasus di Kabupaten Y." *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 8(1), 45-60.
- Sari, D. (2019). "Partisipasi Masyarakat dalam Program Rehabilitasi RTLH di Kabupaten X." *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 123-135.